

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang berkembang tentunya masih menghadapi masalah-masalah yang dialami negara berkembang seperti masalah kemiskinan, pendidikan rendah, pengangguran dan lain-lain. Kemiskinan ini dapat dikatakan masih menjadi masalah utama, dikarenakan hampir merata di semua provinsi di Indonesia, tak terkecuali di provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan pada tahun 2011 berjumlah 5.256.000 juta jiwa dari jumlah penduduk Jawa Tengah sesuai sensus penduduk 2010 yang berjumlah 32.382.657 juta jiwa, maka jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sendiri berjumlah 16% dari keseluruhan penduduk Jawa Tengah. Mengingat masalah kemiskinan ini masih menjadi masalah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota maka masing-masing pun membuat program pengentasan kemiskinan. Kota Semarang sendiri memiliki motto Semarang Setara yang berarti Kota Semarang ingin mensejajarkan posisinya setara atau satu tingkat dengan kota metropolitan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, selain itu Setara juga merupakan akronim dari Semarang Kota Sejahtera. Berkaitan dengan motto Semarang Setara tersebut maka pemerintah Kota Semarang memiliki program yang dinamakan sapta program sebagai bentuk langkah kongkrit tercapainya kesetaraan atau sejajarnya Kota Semarang dengan kota metropolitan lainnya. Sapta Program tersebut terdiri dari :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran
2. Penanggulangan rob dan banjir
3. Peningkatan pelayanan publik
4. Tata ruang dan infrastruktur
5. Kesetaraan dan keadilan gender
6. Pendidikan
7. Kesehatan

Dari sapta program tersebut, salah satu program fokus terhadap permasalahan kemiskinan. Hal ini dikarenakan penduduk miskin di Kota Semarang dalam skala prosentase berkisar 21%, tentunya hal ini juga dianggap masalah utama bagi pemerintah Kota Semarang. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang memiliki salah satu program unggulan yang dinamakan Gerdu Kempling. Gerdu Kempling merupakan akronim dari Gerakan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan. Gerdu Kempling sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2011, dimana didalamnya terdapat berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak dikarenakan masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang perlu dukungan berbagai stakeholders.

Gerdu Kempling sendiri ditarget dapat menurunkan jumlah penduduk miskin minimal 2% pertahun. Berkaca dari target yang ditetapkan pemerintah Kota Semarang tersebut, Gerdu Kempling mampu menurunkan jumlah penduduk

miskin sebesar 4,95% dari tahun 2011 yang berjumlah 448.398 jiwa atau 26,44% menjadi 373.978 pada tahun 2013 atau 21,49%.

Berdasarkan data tersebut tentunya target dari program Gerdu Kempling tercapai namun berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin (SIMGAKIN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang masih terdapat 42 kelurahan dari 13 keluarahan berdasarkan data tahun 2013 yang belum merasakan dampak positif dari program Gerdu Kempling atau dengan kata lain penduduk miskin pada kelurahan tersebut masih sama bahkan terjadi peningkatan penduduk miskin. Dari 42 kelurahan, enam kelurahan yang mengalami peningkatan penduduk miskin berada pada Kecamatan Pedurungan antara lain Kelurahan Penggaron Kidul, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kelurahan Plamongansari, Kelurahan Gemah, Kelurahan Palebon, dan Kelurahan Kalicari. Berdasarkan data SIMGAKIN pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di enam kelurahan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Miskin Enam Kelurahan Tahun 2009 di Kecamatan  
Pedurungan

Nama Kelurahan	Rawan Miskin		Miskin		Sangat Miskin		Total KK	Total Jiwa
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Penggaron Kidul	173	620	72	260	0	0	245	880
Muktiharjo Kidul	849	3231	489	1948	0	0	1338	5169
Plamongansari	297	1092	107	337	0	0	404	1429
Gemah	539	2153	179	711	0	0	718	2864
Palebon	361	1371	161	626	0	0	522	1997
Kalicari	175	717	80	336	0	0	225	1052

Sumber :SIMGAKIN Bappeda Kota Semarang 2013

Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 dari enam kelurahan berjumlah 13.392 jiwa atau sekitar 51% dari total keseluruhan penduduk miskin di Kecamatan Pedurungan yang berjumlah 25.877 jiwa, data tersebut sebelum program Gerdu Kempling diterapkan di Kota Semarang. Jika kita melihat data di atas maka kelurahan Gemah merupakan salah satu kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya cukup banyak, diantara enam kecamatan lain di Kecamatan Pedurungan. Berikut adalah jumlah penduduk miskin di kelurahan Gemah pada tahun 2011 dan tahun 2013.

Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk Miskin tahun 2011 di Kelurahan Gemah

Nama Kelurahan	Rawan Miskin		Miskin		Sangat Miskin		Total KK	Total Jiwa
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Gemah	354	1429	138	496	0	0	492	1925

Sumber : SIMGAKIN Bappeda Kota Semarang 2013

Jika kita melihat data tersebut, dari tahun 2009 menuju tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin baik yang dikategorikan rawan miskin dan miskin di kelurahan Gemah mengalami penurunan yang cukup signifikan dan pada tahun 2011 inilah program Gerdu Kempling dilaksanakan di berbagai kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Semarang.

Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Miskin tahun 2013 di Kelurahan Gemah

Nama Kelurahan	Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin		Total KK	Total Jiwa
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Gemah	1198	4033	64	217	0	0	1262	4250

Sumber : SIMGAKIN Bappeda Kota Semarang 2013

Sementara itu pada tahun 2013 kelurahan Gemah mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang sangat besar, lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di tahun 2011. Bahkan jumlah penduduk miskin di Kelurahan

Gemah tahun 2013 jauh lebih besar dibanding pada tahun 2009, dimana program Gerdu Kempling belum berjalan. Pelaksanaan program Gerdu Kempling memang tidak bisa serentak pada tiap kelurahan di masing-masing kecamatan, maka dari itulah dilakukan giliran pelaksanaan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2013 program Gerdu Kempling dilaksanakan di Kelurahan Gemah, bersamaan dengan Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagai kelurahan sasaran pada Kecamatan Pedurungan. Pemilihan Kelurahan Gemah sebagai kelurahan sasaran dari program Gerdu Kempling tentunya merupakan hal yang sangat wajar dikarenakan jumlah penduduk miskin merupakan yang terbesar dibandingkan kelurahan lain yang jumlah penduduk miskinnya mengalami peningkatan. Dengan dilaksanakannya program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah tentu harapannya adalah penurunan jumlah penduduk miskin dan pemerintah berhasil memberdayakan masyarakatnya. Namun data pada tahun 2015 melalui data SIMGAKIN, khususnya di kelurahan Gemah mengatakan hal yang sebaliknya.

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk Miskin tahun 2015 di Kelurahan Gemah

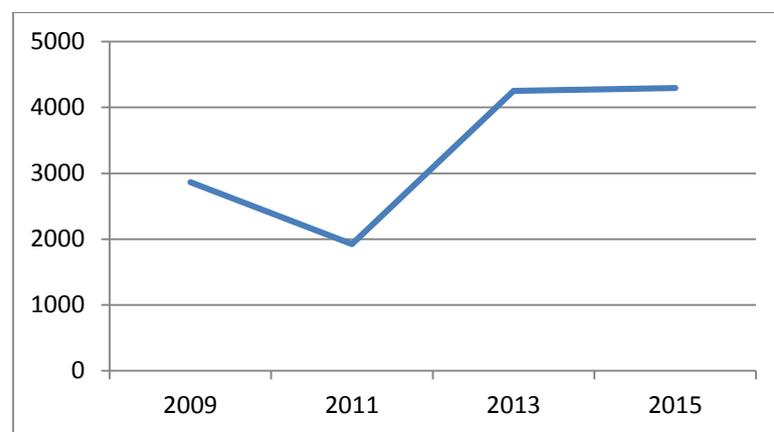
Nama Kelurahan	Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin		Total KK	Total Jiwa
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
	Gemah	1226	4067	66	230	0	0	1292

Sumber : SIMGAKIN Bappeda Kota Semarang 2015

Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di kelurahan Gemah lagi-lagi mengalami peningkatan, padahal jika kita melihat pada tahun 2013 program

Gerdu Kempling sudah dilaksanakan disini. Tentunya waktu dua tahun memang bukan waktu yang cukup untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, namun yang terjadi di kelurahan Gemah adalah sebaliknya, bukannya menurun malah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.5  
Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kelurahan Gemah 2009-2015



Sumber : SIMGAKIN Bappeda Kota Semarang 2015

Jika berkaca dari pernyataan di awal bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Semarang berkurang memang benar, tetapi terdapat permasalahan baru dimana terdapat kelurahan yang tidak menunjukkan dampak positif dari program Gerdu Kempling salah satunya adalah kelurahan Gemah di kecamatan Pedurungan. Terlebih lagi jumlah penduduk miskin di kelurahan Gemah malah semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana program Gerdu Kempling belum ada / terlaksana. Maka dapat dikatakan bahwa dampak program Gerdu Kempling belum merata di tiap kelurahan dimana kelurahan Gemah di Kecamatan Pedurungan malah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Untuk itu maka penulis akan menganalisis tentang evaluasi dampak program Gerdu Kempling bidang Ekonomi di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan

untuk melihat dampak dari program Gerdu Kempling bidang Ekonomi yang telah berjalan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari penjabaran tentang program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah tahun 2013?
2. Apa dampak program Gerdu Kempling terhadap penduduk miskin di Kelurahan Gemah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini sebagaimana rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui proses dari program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah tahun 2013
2. Untuk mengetahui hasil program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah tahun 2013
3. Untuk mendiskripsikan dampak dari program Gerdu Kempling dalam bidang ekonomi di Kelurahan Gemah
4. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah tahun 2013
5. Untuk memberikan solusi/rekomendasi terhadap dampak yang muncul dari program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah tahun 2013

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori mengenai evaluasi program penanggulangan kemiskinan, yang nantinya dapat digunakan dalam mengembangkan program penanggulangan kemiskinan di daerah lain agar dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai hasil dan dampak dari program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah.

#### **b. Bagi Lembaga Pelaksana**

Menjadi referensi tambahan bagi badan terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang serta Kelurahan Gemah untuk dapat mengembangkan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya sehingga dapat di manfaatkan secara lebih maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

#### **c. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi universitas terutama bagi mahasiswa lain yang nantinya akan dig.unakan sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya

d. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan bagi pembaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai kemiskinan di Kota Semarang mengenai pelaksanaan dan dampaknya.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Untuk menambah referensi dan acuan bagi penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan menyajikan tabel yang berisi hasil penelitian terdahulu tentang program Gerdu Kempling di Kota Semarang. Tujuan dari penyajian tabel penelitian terdahulu berguna untuk mengembangkan penelitian yang dilaksanakan serta menghindari terjadinya pembahasan yang sama yang sudah dilakukan pada penelitian terdahulu.

**Tabel 1.6**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Sasaran	Perbedaan
1	Muhammad Burhanudin Noor 2014, Portal Garuda Vol. 3 No. 4 2014	Evaluasi Program Padat Karya Produktif Dalam Gerdu Kempling Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 2011	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja program padat karya produktif dalam Gerdu Kempling tahun 2011 dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program padat karya produktif	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Penelitian ini menjelaskan fenomena tentang bagaimana program padat karya produktif yang dilaksanakan pada tahun 2011 di beberapa kriteria sudah baik namun secara keseluruhan masih terdapat kekurangan serta hambatan - hambatan yang masih banyak ditemui seperti kurang monitoring, kurangnya pendampingan, kurangnya anggaran.	Perbedaan kriteria evaluasi yang digunakan, dan fokus evaluasi lebih pada kinerja bukan dampak
2	Yuni Kurniasih 2015, Portal Garuda Vol. 4 No. 3 2015	Implementasi Program Wirausaha Baru Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mendukung Gerdu Kemoling Kota Semarang 2014	Untuk mengetahui pelaksanaan program wirausaha baru dalam mendukung Gerdu Kempling oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014 serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya	Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Dilihat dari kebijakan dan pelaksana program wirausaha baru ini sudah tepat namun jika dilihat dari target, lingkungan dan proses masih kurang maksimal serta menemukan faktor pendorong dan pengambatnya dilihat dari empat aspek yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, diposisi pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik	Perbedaan model, lebih fokus pada model implementasi Van Meter dan Van Horn

3	Astrid Ratri Sekar Ayu 2014, Portal Garuda Vol. 3 No. 3 2014	Implementasi Program Gerdu Kempling di Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Mengetahui implementasi Program Gerdu Kempling di Kelurahan Palebon serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi	Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif	Program Gerdu Kempling di Kelurahan Palebon sudah terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari lima kriteria yang dinilai baik namun ada satu yang kurang baik yaitu dari kriteria lingkungan eksternal sementara faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dikarenakan sinergitas antara pelaksana program dengan masyarakat ditunjukkan dengan pemahaman program dan partisipasi yang baik.	Perbedaan model, lebih fokus pada model implementasi Merilee S. Grindle
4	Jauhar Faisal Rahman 2013, Portal Garuda Vol. 2 No.4 2013	Implementasi Program Gerdu Kempling Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Mengetahui secara rinci isi kebijakan dan proses implementasi Program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat	Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Implementasi Program Gerdu Kempling di Kelurahan Palebon, Pedurungan Lor dan Gemah sudah diagendakan dengan baik, namun ada satu kendala yaitu kesungguhan masyarakatnya masih kurang dan kegiatan yang dijalankan seringkali hanya aktif di awal pelaksanaan saja	Perbedaan model, lebih fokus pada model implementasi George C. Edward
5	Yanuar Widi Nugroho 2014, Portal Garuda Vol. 3 No. 4 2014	Implementasi Gerdu Kempling di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang 2011	Mengetahui proses pelaksanaan implementasi dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat program Gerdu Kempling di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Implementasi Program Gerdu Kempling di Kelurahan Rowosari masih tidak sesuai harapan karena masih adanya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai, kemudian pendampingan dan pelatihan yang diberikan juga kurang sehingga banyak yang gagal, terlebih tidak ada evaluasi dan tindak lanjut membuat program sulit berkembang	Perbedaan model, lebih fokus pada model implementasi Mazmanian dan Sabatier

					sementara faktor pendukung dan penghambatnya lebih banyak faktor penghambat	
6	Harir Nafiah 2014, Portal Garuda Vol. 3 No. 3 2014	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Program Gerdu Kempling di kecamatan Pedurungan	Menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan pada Program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung.	Penelitian Kualitatif deskriptif	Pengembangan kapasitas kelembagaan kurang berjalan maksimal karena dari pelaksana maupun sumber daya belum mampu diterapkan dengan baik sementara faktor pendukung yaitu akses informasi mudah dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang cukup.	Fokus pada pengembangan kelembagaan menurut Milton J. Esman dan Teguh Yuwono

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan mengalami perbedaan dalam fokus dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan fokus tersebut yaitu pada evaluasi dampak untuk mengetahui apa saja dampak yang dirasakan oleh unit sosial terdampak dalam program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1 Administrasi Publik**

Administrasi publik memiliki berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa definisi administrasi publik menurut para ahli (Wirman Syafri, 2012:20-25) :

1. Pfiffner & Presthus (1960)

Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.

2. Woodrow Wilson

Administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat , yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta.

3. Levine, Peters, dan Thomson (1990)

Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada berbagai kebijakan dan program organisasi pemerintah, termasuk perilaku para pejabat (yang biasanya tidak dipilih) yang secara formal bertanggung jawab atas perilaku mereka.

4. Dwight Waldo

Administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

5. Sondang P. Siagian

Administrasi publik didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas maka dapat kita simpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan program yang dijalankan dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **1.6.2 Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki banyak definisi yang diberikan oleh para ahli, namun definisi yang diberikan para ahli tersebut berbeda dari sudut pandangnya. Berikut adalah beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli :

1. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (Leo Agustino, 2012:6)

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2. Thomas R. Dye (Leo Agustino, 2012:7)

Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

3. Easton (Budi Winarno, 2012: 23)

Kebijakan publik diartikan sebagai penguasa dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislative, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya. Mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

4. Anderson (Mas Roro Lilik Ekowati, 2009:5)

Kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi yaitu :

1. Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan.
2. Bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijaksanaan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Bahwa kebijaksanaan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undang yang bersifat memaksa.

5. Woll (Hessel Nogi, 2003:2)

Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah :

1. Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

Dari definisi dari beberapa ahli mengenai kebijakan publik di atas maka dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur atau memecahkan suatu permasalahan dengan sifat mengikat masyarakat. Dan tindakan yang diambil pemerintah tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Maka kebijakan publik pun harus memenuhi kriteria di atas tanpa melupakan kepentingan masyarakatnya.

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Anderson (1979)

membedakan lima langkah dalam proses kebijakan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adoptions*, (d) *policy implementation*, dan (e) *policy assessment/evaluation*. Sedangkan Ripley (1985) membedakan dalam empat tahapan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) *formulation and legitimating of goal and programs*, (c) *program implementation, performance, and impact*, (d) *decision about the future of the policy and program*.(Joko Widodo: 2009:16)

Sedangkan menurut Thomas R. Dye (Joko Widodo, 2009:16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

1. Identifikasi masalah kebijakan

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan aktifitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan Kebijakan

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

#### 4. Pengesahan Kebijakan

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

#### 5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

#### 6. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Pada penulisan ini, penulis akan memfokuskan kebijakan publik dalam proses evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan berguna untuk mengetahui (1) efektifitas atau dampak suatu kebijakan diukur, (2) pelaksana kebijakan, (3) konsekuensi yang ditimbulkan dari evaluasi kebijakan, (4) apa tuntutan untuk mengubah atau mencabut kebijakan. Selain itu dalam evaluasi kebijakan akan terlihat sifat dari kebijakan publik yaitu *policy output* dan *policy outcomes*. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik, atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *output* kebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah. Hal ini dapat dibedakan dengan apa yang akan dikerjakan pemerintah. *Policy output* atau hasil kebijakan biasanya dititik beratkan pada masalah-masalah. Sedangkan *policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat.

### 1.6.3 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik seringkali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Anderson (Solahuddin Kusumanegara, 2010:124)

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

2. Jones (Ismail Nawawi, 20019:155)

Evaluasi suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan. Ia bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metoda analisis, dan bentuk analisis dengan uraian di bawah ini :

1. Spesifikasi, merupakan sub kegiatan terpenting. Ia mengacu pada identifikasi tujuan serta kriteria-kriteria tujuan yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau program.
2. Pengukuran, secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan evaluasi.
3. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan.
4. Rekomendasi adalah suatu penentua atau penemuan mengenai apa yang akan dilanjutkan selanjutnya.

3. Lester dan Stewart (Solahuddin Kusumanegara, 2010:124)  
Evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.
4. Charles O. Jones (Mas Roro Lilik Ekowati,2009:97)  
Evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.

Dari definisi dari beberapa ahli mengenai evaluasi kebijakan maka dapat kita simpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai sejauhmana kebijakan yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menilai efek dan dampak dari kebijakan tersebut.

#### Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

1. Putra (Mas Roro Lilik Ekowati, 2009:98)
  - a. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Dalam fungsi ini evaluasi kebijakan publik akan lebih banyak meneliti pada aspek instrumental dari kebijakan publik yang ada. Ia akan melakukan evaluasi atas penampilan atau kinerja dari proses berjalannya organ kebijakan publik yang dievaluasi. Sampai sejauhmana pula organ kebijakan publik tersebut efektif sebagai instrument pemberi solusi.

- b. Untuk menilai keterkaitan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan publik lebih memfokuskan pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan publik sudah benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada, karena kebijakan publik dibuat atau ditetapkan untuk pencapaian tujuan.

2. Ripley (Mas Roro Lilik Ekowati, 2009:99)

- a. Ekplanasi  
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
- b. Kepatuhan  
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Auditing  
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa dan lain-lain).
- d. Akunting  
Dengan evaluasi dapat diketahui apakah akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi memiliki arti penting sesuai dengan fungsi evaluasi yang dijelaskan. Evaluasi memberikan informasi yang valid tentang pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan dimana di dalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat apakah sesuai dengan prosedur, apakah petugas pelaksana sesuai dengan prosedur. Selain itu evaluasi juga memberikan nilai dari kebijakan itu sendiri, apakah hasil dari kebijakan yang dilaksanakan sudah tercapai oleh kelompok sasaran, apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan dampak yang telah diperkirakan. Maka dari itu evaluasi merupakan proses penting dalam kebijakan publik untuk memberi masukan bahwa kebijakan yang telah dibuat baik atau buruk serta dilanjutkan atau tidak.

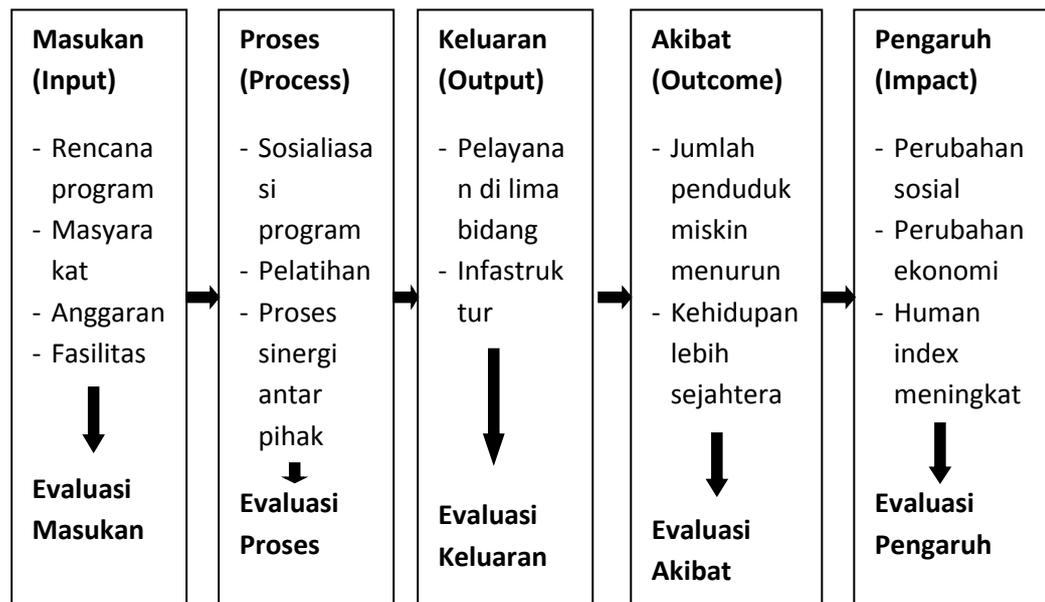
#### **1.6.4 Model Evaluasi**

Dalam Suharsimi Arikunto (2008:40) model evaluasi memiliki maksud untuk melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Stephen Isaac mengatakan bahwa model-model tersebut diberi nama sesuai dengan fokus atau penekannya. Lebih jauh Isaac membedakan adanya empat hal yang digunakan untuk membedakan ragam model evaluasi, yaitu (1) berorientasi pada tujuan program – *good oriented*, (2) berorientasi pada keputusan – *decision oriented*, (3) berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya – *transactional oriented*, dan (4) berorientasi pada pengaruh dan dampak program – *research oriented*.

Dalam Wirawan (2012:107) model evaluasi sistem analisis dikemukakan oleh Karl Luwig von Bertalanffy. Model evaluasi sistem analisis menggunakan perspektif biologi merupakan *science of wholeness* atau sains mengenai keseluruhan. Jika organisme diganti dengan program dan molekul diganti dengan unsur atau subsistem program, maka akan terbentuk sistem program. Suatu program merupakan suatu sistem dari struktur dan fungsi-fungsi yang saling tergantung. Suatu program terdiri dari unit-unit (subsistem) yang harus bekerja secara harmonis. Masing-masing subsistem harus mengetahui apa yang dilakukan unit lainnya. Masing-masing unit harus mampu menerima pesan dan harus cukup berdisiplin untuk mematuhi. Jadi model evaluasi sistem analisis ini terbagi dari unit-unit linier yang saling berkaitan yaitu masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), akibat (*outcome*), dan pengaruh (*impact*). Setiap unit tersebut perlu dievaluasi untuk menentukan nilai dan manfaat keseluruhan sistem. Oleh karena itu, dalam Model evaluasi sistem analisis ini terdapat lima jenis evaluasi yaitu : evaluasi masukan (*input evaluation*) memiliki tujuan untuk menjaring, menganalisis, dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan atau program ; evaluasi proses (*process evaluation*) memfokuskan pada pelaksanaan program dan sering menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki, evaluasi proses merupakan evaluasi formatif dan merupakan katalis untuk pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan ; evaluasi keluaran (*output evaluation*) mengukur dan menilai keluaran daripada program yaitu produk yang dihasilkan program, evaluasi akibat (*outcome evaluation*) mengukur apakah klien

yang mendapat layanan program berubah, dan evaluasi pengaruh (*impact evaluation*) menilai perubahan yang terjadi terhadap klien atau pemangku kepentingan sebagai akibat dari intervensi yang dilakukan program, evaluasi ini mengukur pengaruh program sebagai hasil program dalam jangka panjang. Dalam model evaluasi sistem analisis, setiap jenis evaluasi dapat dilakukan secara parsial, dengan kata lain evaluator dapat memilih jenis evaluasi sesuai dengan kebutuhannya.

**Tabel 1.7**  
**Bagan Model Evaluasi Sistem Analisis**



Sumber : Wirawan (2011 : 109)

Berdasarkan pernyataan bahwa model evaluasi sistem analisis dapat dilakukan parsial sesuai dengan kebutuhan evaluator, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model evaluasi sistem analisis pada bagian keluaran (*output*), dan pengaruh (*impact*). Karena sesuai dengan tujuan penelitian bahwa penulis

ingin mengetahui pada hasil, dampak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian.

#### **1.6.5. Evaluasi Program**

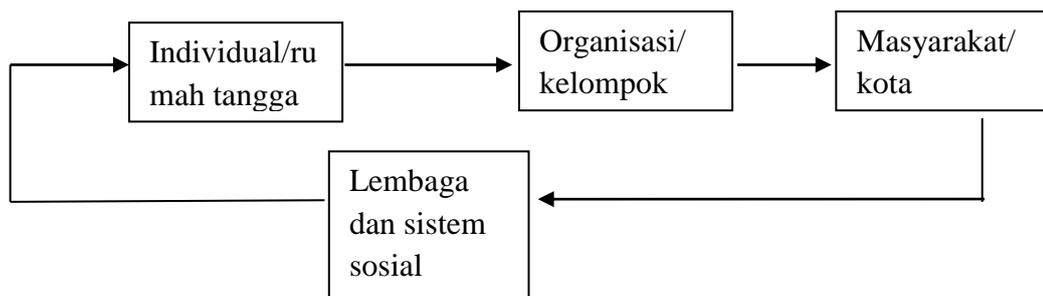
Dalam Wirawan (2012:17) program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses, evaluasi manfaat dan evaluasi akibat. Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan; dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai tentang strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

#### **1.6.6. Evaluasi Dampak**

Dalam Samudra Wibawa (1994: 29) evaluasi dampak merupakan evaluasi yang mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan. Dampak yang dimaksud adalah dampak yang diharapkan serta dampak yang tidak diharapkan.

Dalam Samudra Wibawa (1994:35) untuk mendeskripsikan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini ada dua kategori yang harus dianalisis yaitu unit pedampak dalam arti unit sosial yang terkena dampak dan aspek dampak dalam arti bidang kehidupan yang terkena dampak. Penulis akan memfokuskan mendikripsikan dampak pada unit sosial terkena dampak. Dampak terhadap berbagai unit sosial bersifat agregatif dan resiprokal, tidak terpisah satu sama lain. Dampak kebijakan terhadap individu atau rumah tangga akan merembet pada kelompok, tapi sebaliknya dampak yang langsung mengenai suatu organisasi atau kelompok dapat merembet pada individu dan rumah tangga. Jadi dampak kebijakan dapat berlangsung secara sekuensial maupun resprikoral, yang keduanya bersifat akumulatif. Seperti bagan tentang resiprokalitas dampak kebijakan berikut ini :

**Tabel 1.8**  
**Bagan Resiprokalitas Dampak Kebijakan**



Sumber : Samudra Wibawa (1994: 53)

a. Dampak Individual

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta

personal. Dampak biologis atau fisik biasanya menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik dan kurang gizi. Dampak psikis dapat berupa alienasi, stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi, dan lain-lain. Dampak lingkungan yang dimaksud adalah keharusan untuk berpindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena adanya suatu proyek. Dampak ekonomi tidak saja menyentuh para pekerja melainkan juga pemilik modal dan bahkan konsumen. Dampak sosial dan personal meliputi banyak dimensi atau aspek, dilihat darimana posisi individu tersebut.

b. Dampak Organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung ataupun tidak. Dampak yang langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya, sementara dampak tak langsung dapat berupa pengaruh terhadap karyawan.

c. Dampak Terhadap Masyarakat

Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

d. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial merupakan akibat dari banyak faktor, bukan hanya merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan. Dalam menganalisis perubahan sistem sosial

selama ini dikenal dua perspektif yang dominan, yakni fungsionalisme dan teori konflik. Perspektif fungsionalisme mengamati cara sistem sosial mengadaptasi perubahan dengan tetap menjaga strukturnya. Menurut pendekatan ini, seandainya sistem sosial tertuntut untuk melakukan perubahan struktural, nilai dasar dan organisasi masyarakatnya tetap akan dijaga. Sementara itu teori konflik melihat perubahan sistem sosial sebagai respon terhadap kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Jadi teori konflik banyak mengamati apa kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat dan bagaimana mereka berkonflik satu sama lain. Sistem dan lembaga sosial yang eksis di suatu waktu mencerminkan cara konflik itu dikelola.

#### **1.6.7 Program Gerdu Kempling Bidang Ekonomi**

Dampak program merupakan dampak yang terjadi baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan dari berjalannya suatu program. Model evaluasi yang digunakan yaitu model evaluasi sistem analisis, agar bisa melihat dampak program secara jelas tentunya kita juga perlu melihat *output* dan *outcome* dari program yang dijalankan, penulis akan memilih dua bagian dari model evaluasi sistem analisis, yaitu evaluasi keluaran dan evaluasi pengaruh. Maka evaluasi dampak program Gerdu Kempling akan melihat dampak dari kelompok sasaran penerima program serta hasil pelaksanaan dari program Gerdu Kempling. Evaluasi dampak program Gerdu Kempling memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran dari sebelum program dilaksanakan dan setelah

program dilaksanakan, sehingga membandingkan dan melihat apakah program Gerdu Kempling menghasilkan dampak yang diinginkan atau tidak yang menyebabkan perubahan keadaan terhadap kelompok sasaran. Hal ini selaras dengan tujuan dari program Gerdu Kempling sendiri yaitu : (1) sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, (2) mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kota Semarang untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, (3) meminimalkan hambatan dan permasalahan. Sehingga dapat terlihat apakah dampak yang terjadi sudah sesuai dengan tujuan dan pengembangan potensi dari program Gerdu Kempling, dan bagaimana hambatan dan permasalahan yang terjadi yang berasal dari respon kelompok sasaran dan pelaksana program. Dampak yang akan dievaluasi dari program Gerdu Kempling yaitu area yang dituju dari program Gerdu Kempling itu sendiri, yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi akan dilihat pada tiap-tiap unit sosial terdampak yaitu dari individu, organisasional, masyarakat serta lembaga dan sistem sosial.

Berdasarkan hasil dan unit sosial terdampak dilihat, maka evaluasi dampak program Gerdu Kempling memerlukan suatu kriteria untuk melakukan penilaian. Dalam Subarsono (2011: 126), Dunn mengembangkan lima kriteria evaluasi kebijakan, yaitu :

**Tabel 1.9**  
**Kriteria Evaluasi Kebijakan**

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kelompok masyarakat yang berbeda
4	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat

Sumber : Subarsono (2011: 126)

Berdasarkan lima kriteria evaluasi menurut Dunn di atas, maka penulis akan menggunakan masing-masing kriteria-kriteria evaluasi tersebut namun disesuaikan dengan unit-unit sosial pedampak atau pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

Selain itu kriteria lain untuk mengevaluasi kebijakan dari pendapat Henry, Brian dan White dalam Samudra Wibawa (1994 : 65) adalah sebagai berikut :

- a. waktu pencapaian
- b. tingkat pengaruh yang diinginkan
- c. perubahan perilaku masyarakat
- d. pelajaran yang diperoleh dari pelaksana proyek

e. tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya

Berasarkan kriteria evaluasi menurut Henry, Brian dan White di atas maka penulis akan menggunakan masing-masing kriteria-kriteria evaluasi, namun akan disesuaikan dengan unit-unit sosial pedampak atau pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

Dari dua indikator di atas, penulis akan memilih kriteria apa saja untuk melihat hasil dan dampak program Gerdu Kempling bidang ekonomi, yaitu :

1. Hasil dari pelaksanaan program Gerdu Kempling

Hasil dari pelaksanaan program dapat berupa pelatihan atau pendampingan maupun bantuan peralatan sesuai dengan potensi kelompok masyarakat yang menerima bantuan program. Untuk melihat hasil maka kriteria yang digunakan yaitu efektivitas dan pemerataan.

2. Tingkat pengaruh yang diinginkan terhadap unit sosial pedampak

- Individual

Untuk melihat dampak individual maka kriteria yang akan digunakan yaitu responsivitas, ketepatan dan perubahan perilaku masyarakat Dampak terhadap unit individual bisa dilihat dari berbagai macam aspek baik dari aspek biologis, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal.

- Organisasional

Untuk melihat dampak organisasional maka kriteria yang digunakan adalah responsivitas, ketepatan, perubahan perilaku masyarakat dan

pelajaran yang diperoleh dari pelaksana proyek Dampak terhadap unit organisasional tentunya berkaitan dengan kelompok masyarakat yang menerima bantuan program, dampak langsung yaitu melihat terbantu atau terganggunya kelompok dalam mencapai tujuannya, sementara dampak tidak langsung dilihat dari anggota kelompok tersebut.

- Masyarakat

Untuk melihat dampak terhadap masyarakat maka kriteria yang digunakan yaitu kecukupan, perubahan perilaku masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya. Dampak terhadap unit masyarakat akan melihat bagaimana kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kapasitas masyarakat itu sendiri serta melihat output dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini apakah program Gerdu Kempling bidang ekonomi mampu mengubah kapasitas serta output masyarakat.

- Lembaga dan Sistem Sosial

Dampak terhadap unit lembaga dan sistem sosial ini akan melihat apakah terjadi perbedaan dalam strukturnya. Maka digunakan kriteria kecukupan,, tingkat pengaruh yang diinginkan dan pelajaran yang diperoleh dari pelaksana proyek.

## 1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian evaluasi dampak program Gerdu Kempling bidang Ekonomi di Kelurahan Gemah, akan melihat hasil dan dampak program. Maka gejala yang akan diamati berdasarkan kriteria penelitian, yaitu :

1. Proses program Gerdu Kempling
  - Koordinasi antara koordinator dan lembaga pelaksana
  - Koordinasi antara lembaga pelaksana dan masyarakat
2. Hasil dari pelaksanaan program Gerdu Kempling
  - Pelatihan kelompok masyarakat
  - Bantuan peralatan kelompok masyarakat
3. Tingkat pengaruh yang diinginkan terhadap unit sosial pedampak
  - a. Individual
    - Dampak biologis penerima bantuan program
    - Dampak psikis penerima bantuan program
    - Dampak lingkungan hidup penerima bantuan program
    - Dampak ekonomi penerima bantuan program
    - Dampak sosial serta personal penerima bantuan program
  - b. Organisasional
    - Pencapaian tujuan kelompok penerima bantuan program
    - Perubahan perilaku anggota kelompok penerima bantuan program
    - Respon lembaga pelaksana program

c. Masyarakat

- Perubahan perilaku masyarakat
- Kapasitas masyarakat penerima bantuan program
- Jumlah penduduk miskin di Kelurahan Gemah

d. Lembaga dan Sistem Sosial

- Perbedaan struktur di masyarakat
- Target pelaksanaan program Gerdu Kempling di Kelurahan Gemah
- Respon lembaga pelaksana program

## **1.8 Metoda Penelitian**

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan memanfaatkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia, dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Untuk metode kualitatif menyajikan data yang digunakan dengan data yang rinci dengan jumlah orang yang terbatas dan kasus. Data pada metode kualitatif menyediakan kedalaman dan kerincian melalui pengutipan secara

langsung dan deskripsi yang teliti tentang situasi program, kejadian, orang, interaksi dan perilaku yang teramati.

Tipe penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Deskriptif

Merupakan suatu pemecahan masalah dengan membandingkan gejala yang ada, mengadakan klarifikasi gejala dan menetapkan pengaruh gejala yang ditemukan.

b. Penelitian Eksploratif

Merupakan penelitian yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu, dalam artian bahwa untuk merumuskan masalah secara terperinci.

Evaluasi kualitatif merupakan evaluasi yang dilakukan evaluator dalam melakukan penelitiannya berperan aktif dan menggunakan metode penelitian dan teknik yang digunakan untuk menjawab problem evaluasi.

Dalam melakukan evaluasi tidak hanya data atau informasi yang digunakan untuk menilai hasil akhir adanya suatu program, tetapi harus disertai proses program pada pelaksanaannya dan hal apa saja yang terjadi pada proses program tersebut berjalan.

Penelitian ini menggunakan penelitian tipe deskriptif kualitatif, karena penulis bermaksud untuk menggambarkan secara deskriptif tentang program Gerdu Kempling dan untuk mengetahui hasil, manfaat serta dampak dari program Gerdu Kempling khususnya di bidang Ekonomi.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Lokus yang akan dijadikan penelitian Evaluasi Dampak Gerdu Kempling Bidang Ekonomi adalah di Kelurahan Gemah, hal ini didasarkan karena data penduduk miskin yang tetap tinggi dibandingkan dengan kelurahan lain yang menerima bantuan program.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh informan kunci yaitu orang-orang yang mempengaruhi dengan benar atau yang terpercaya untuk mengkaji dampak program Gerdu Kempling di bidang ekonomi. Berdasarkan hal tersebut peneliti telah menentukan informan yang dapat berkembang sewaktu-waktu dibutuhkan. Maka informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah BAPPEDA Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kelurahan Gemah, dan masyarakat penerima bantuan program Gerdu Kempling.

### **1.8.4 Jenis Data**

Dalam Moleong (2007:157) Lofland dan Lofland menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka jenis data yang akan digunakan dalam penelitian Evaluasi Dampak Program Gerdu Kempling Bidang Ekonomi di Kecamatan Pedurungan, yaitu :

1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan yang digunakan berasal dari informan yang terkait dalam program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan yang telah diwawancari oleh peneliti.

2. Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam berbagai macam bentuk, yaitu jurnal-jurnal ilmiah, laporan pelaksanaan program Gerdu Kempling pemerintah serta surat kabar maupun majalah yang memuat pelaksanaan program Gerdu Kempling.

3. Foto

Foto juga termasuk sumber data yang mampu memberikan gambaran deskriptif kepada penulis untuk melakukan analisis. Dalam Moleong (2007:160) Bogdan dan Binklen menyatakan bahwa ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan sendiri oleh peneliti. Foto yang dihasilkan orang lain bersumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi maupun surat kabar. Foto yang dihasilkan oleh peneliti berasal dari survei yang dilakukan langsung oleh peneliti.

4. Data Statistik

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan

subjek pada latar penelitian. Data statistik yang digunakan adalah data SIMGAKIN yang diinformasikan oleh BAPPEDA Kota Semarang.

### **1.8.5 Sumber Data**

Jika dilihat dari jenisnya, maka sumber data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan dan partisipan. Informan dapat dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh hasil dari evaluasi dampak program Gerdu Kempling di bidang Ekonomi adalah masyarakat di kelurahan pelaksana program Gerdu Kempling yang mengetahui tentang program Gerdu Kempling dan Pemerintah Kota.

#### **2. Data Sekunder**

Data ini berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan yang sudah diolah seperti teks dokumen, surat-surat, foto yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif metode wawancara dilakukan dengan menggabungkan metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan harapan bahwa menemukan jawaban dari para narasumber secara lebih mendalam. Objek dari wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan dan penerima manfaat program Gerdu Kempling dan pemerintah dari pihak Kelurahan atau Kecamatan sampai Kota.

b. Observasi

Teknik observasi yang digunakan yaitu secara pengamatan langsung pada daerah yang terlibat pada program tersebut dalam artian program Gerdu Kempling di kelurahan yang menjadi sasaran pembangunan program ini, kemudian mengamati kondisi program selama program tersebut berjalan sampai sekarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian berupa tulisan, gambar, foto, rekaman, atau apa yang didapat dalam melakukan observasi di lokasi penelitian atau kelurahan yang menjadi sasaran program Gerdu Kempling.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut Sugiyono (2009:246), proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Menurutnya, teknik analisis data merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis datanya adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas , dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan pemberian kode pada aspek-aspek tertentu.

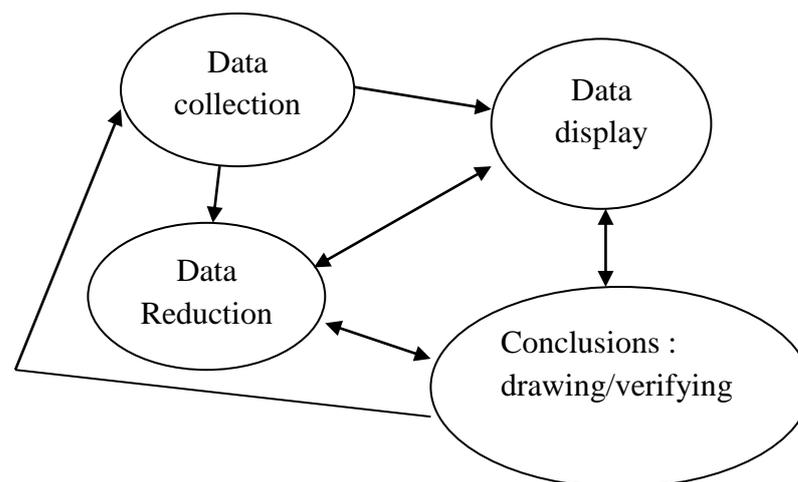
b. Penyajian Data

Penyajian Data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan maupun kategori. Menyesuaikan apa yang ditemukan di lapangan, untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Hal ini terjadi karena temuan dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam dari deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga dari penelitian yang mendalam itu dapat diperoleh data dan hasil yang jelas.

Tabel 1.10  
Bagan Analisis dan Interpretasi Data



Sumber : Sugiyono, (2009:247)

### 1.8.8 Kualitas Data

Untuk memastikan data atau informasi yang digunakan lengkap dan validitas dan reliabilitasnya tinggi penelitian kualitatif menggunakan teknik triangulasi. Menurut Wirawan (2011: 156) Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam satu penelitian untuk menjangkau data atau informasi. Triangulasi adalah metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif sering juga dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur validitas dan realibilitas dalam penelitian kualitatif.

Pendekatan triangulasi yang diterapkan dalam evaluasi program khususnya dan penelitian ilmu social telah memperkuat kesimpulan mengenai

observasi dan mengurangi resiko interpretasi yang salah dengan mempergunakan berbagai sumber data, akan tetapi juga mempergunakan berbagai teknik dan metode untuk meneliti dan menjanging data/informasi dari fenomena yang sama. Dalam triangulasi dapat dilakukan dengan cara seperti berikut:

- a. Melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian.
- b. Melakukan uji silang antara informasi yang sudah diperoleh dalam penelitian oleh informan dengan hasil informasi yang didapat pada observasi di lapangan.
- c. Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.